

Proposal Kebijakan untuk Kabinet Baru

— Visi 2045: Berada di 5 Besar Ekonomi Dunia —

Oktober 2019

The Jakarta Japan Club

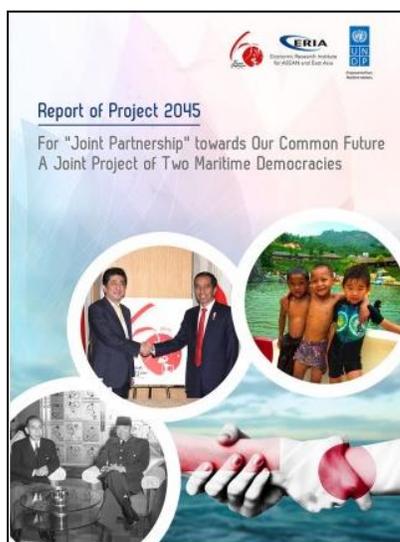
Daftar Isi

[Kata Pengantar]	- 2 -
[Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Tantangan yang harus di atasi]	- 4 -
1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	- 4 -
2-1. Perbaikan Neraca Transaksi Berjalan	- 5 -
2-2. Peningkatan Produktivitas Kerja	- 6 -
2-3. Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja	- 7 -
2-4. Perbaikan Iklim Bisnis dan Daya Tarik untuk Investasi.....	- 8 -
2-5. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Lebih Lanjut.....	- 10 -
[Proposal Kebijakan dan Kontribusi JJC dalam rangka Indonesia Berada di 5 Ekonomi Terbesar Dunia pada tahun 2045].....	- 11 -
1. Perbaikan Iklim Bisnis dan Promosi PMA	- 12 -
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Alih Teknologi	- 19 -
3. Pengembangan Infrastruktur	- 25 -
4. Promosi Ekspor/Perluasan Pasar Domestik	- 28 -
5. Lain-Lain.....	- 30 -

[Kata Pengantar]

Pada tahun 2018, Jepang dan Indonesia merayakan peringatan hubungan diplomatik 60 tahun, berbagai acara peringatan pun dilaksanakan. Sebagai satu proyek dalam kerangka peringatan tersebut, disusunlah laporan “*Indonesia-Japan 2045: A Joint Project of Two Maritime Democracies*¹ (Proyek 2045)” oleh pakar Indonesia dan Jepang dengan dukungan finansial dari pemerintah Jepang dan Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) perwakilan Indonesia dan ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia) sebagai organisasi pelaksana. Pesan utama dari Proyek 2045 adalah “Masa Depan Kita Bersama”. Berdasarkan dokumen kedua negara terkait visi yang ada, pesan tersebut menyebutkan tentang tahapan-tahapan yang harus ditempuh dan faktor-faktor yang mendorong pencapaiannya.

Jepang dan Indonesia memiliki tujuan yang sama untuk berada di peringkat 5 besar di dunia pada tahun 2045. Pada Visi Indonesia 2045 yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia juga menyatakan PDB Indonesia akan berada di peringkat 5 besar dunia. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Proyek 2045 mengemukakan perlunya penguatan ekonomi melalui investasi, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan penguatan rantai pasokan regional dan global di Indonesia dan Jepang.



PDB 5 besar dunia pada tahun 2045

Bersama-sama dengan kabinet baru, perusahaan Jepang anggota The Jakarta Japan Club (JJC) ingin turut berkontribusi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar-besarnya dan pertumbuhan yang stabil menuju sasaran 2045 berdasarkan perspektif Proyek 2045.

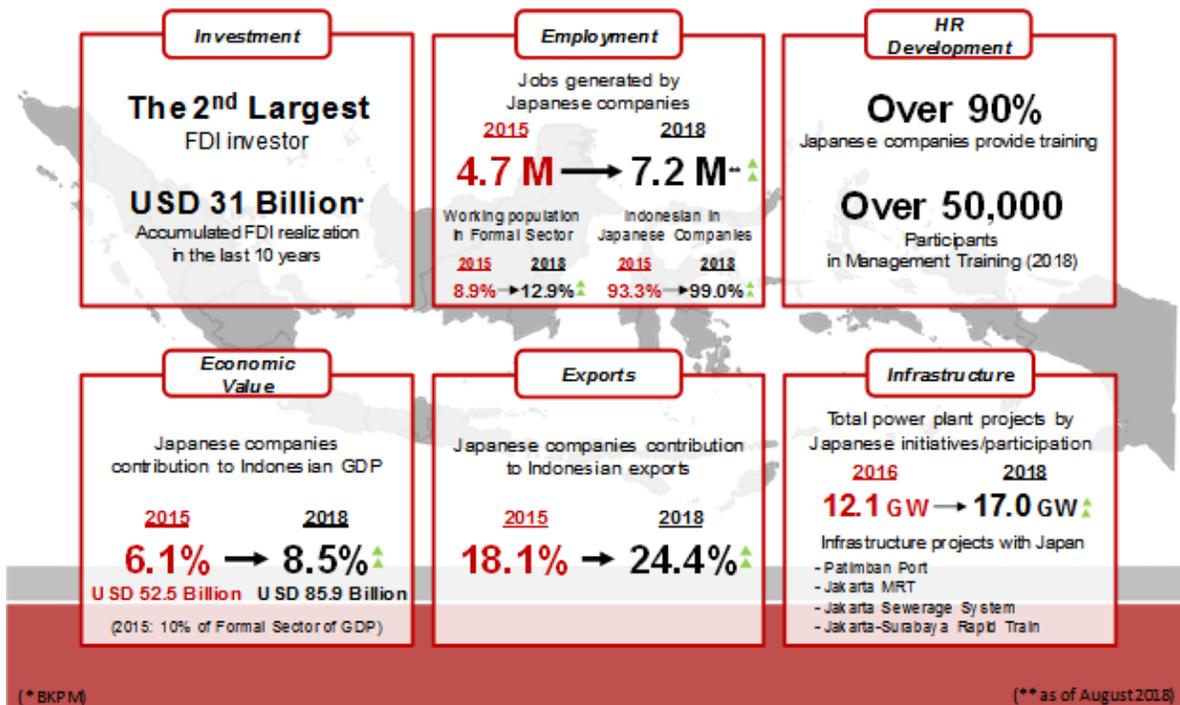
¹ <http://www.eria.org/publications/report-of-project-2045-for-joint-partnership-towards-our-common-future-a-joint-project-of-two-maritime-democracies/>

Perusahaan Jepang telah berinvestasi di Indonesia sejak awal tahun 1970-an. Jepang adalah investor terbesar ke-2 dengan akumulasi realisasi investasi PMA selama 10 tahun terakhir. Lebih dari 1.900 perusahaan Jepang di Indonesia, antara lain industri otomotif dan elektronika, yang mulai membangun rantai pasokan yang kuat. Perusahaan Jepang tidak hanya melakukan produksi di Indonesia, tetapi juga melakukan alih teknologi, membina teknisi Indonesia, dan berkontribusi untuk meningkatkan level teknologi pada industri lokal. Sejauh ini, perusahaan Jepang telah membangun fondasi yang kuat di Indonesia dengan terus berupaya untuk membangun rantai pasokan dan sumber daya manusia, sehingga Jepang dan Indonesia telah membangun *win-win solution* yang baik. Pada tahun 2018, kontribusi perusahaan Jepang sebesar 8,5 persen dari PDB Indonesia, mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 7,2 juta orang, dan 24,4 persen ekspor Indonesia.

Selain itu, dalam proses pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi saat ini, diperlukan antisipasi terhadap tantangan baru seperti peningkatan nilai tambah pada aktivitas industri, masalah lingkungan dsb. Perusahaan Jepang pada saat proses pertumbuhan ekonomi tinggi Jepang di masa lalu, telah mengalami perjuangan menghadapi dan mengatasi masalah seperti yang terjadi di Indonesia.

Oleh karena itu, perusahaan Jepang anggota JJC ingin berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia ke depan sebagai mitra yang dapat berbagi dan menyelesaikan tantangan yang ada bersama-sama.

Kontribusi Perusahaan Jepang dalam Perekonomian Indonesia



Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan dan mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar-sebesarnya, sangat diperlukan upaya untuk memperkuat daya saing industri Indonesia melalui perbaikan neraca transaksi berjalan, peningkatan produktivitas kerja, peningkatan penempatan tenaga kerja, perbaikan iklim bisnis dan daya tarik investasi, dan pengembangan infrastruktur lebih lanjut.

2. Tantangan yang harus diatasi

2-1. Perbaikan Neraca Transaksi Berjalan

Ekonomi Indonesia tumbuh dengan stabil, tetapi sejak neraca berjalan bergeser ke negatif pada tahun 2012, posisi masih bertahan di negatif dan belum berhasil membaik. Salah satu penyebab neraca transaksi negatif saat ini karena neraca perdagangan masih defisit. Dalam perdagangan, sebagian besar komponen yang merupakan sumber nilai tambah dalam manufaktur masih diimpor. Diperkirakan kondisi tersebut mendorong neraca lebih buruk karena seiring meluasnya pasar domestik, semakin meningkat pula jumlah impor ditambah lagi kenaikan harga impor dikarenakan kondisi nilai Rupiah yang semakin melemah. Untuk mengatasi hal tersebut, penting untuk mendorong ekspor. Untuk itu diperlukan adanya produk ekspor yang berdaya saing tinggi. Apabila diupayakan perbaikan neraca perdagangan dengan menahan impor, dikhawatirkan akan berdampak pada rantai pasokan yang dapat memicu peningkatan biaya keterlambatan produksi sehingga dapat mempengaruhi tidak hanya ekspor tetapi juga pasar domestik. Dalam rangka mewujudkan peningkatan ekspor, diperlukan berbagai upaya, seperti peningkatan produktivitas kerja, peningkatan penempatan tenaga kerja, perbaikan iklim bisnis dan daya tarik investasi, serta pengembangan infrastruktur lebih lanjut.

Selain itu, sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alam, Indonesia mengekspor banyak sumber daya alam, namun juga mengimpor dengan porsi yang cukup besar. Bahkan untuk gas alam, yang saat ini masih berada di posisi sebagai pengeksport dikhawatirkan dapat beralih menjadi pengimpor pada tahun 2025 dikarenakan meningkatnya permintaan domestik, sehingga ada kemungkinan neraca perdagangan akan memburuk di bidang energi. Indonesia Economy Outlook² dari Universitas Indonesia juga mengemukakan kemungkinan subsidi bahan bakar untuk bensin, dll., akan menekan anggaran pemerintah. Mengingat waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan yang lebih lama, maka sektor energi diharapkan berperan sebagai pondasi yang mendukung kegiatan ekonomi Indonesia dengan perspektif jangka panjang.

² <https://www.lpem.org/wp-content/uploads/2018/11/Indonesia-Economic-Outlook-2019.pdf>

2-2. Peningkatan Produktivitas Kerja

Menurut *APO Productivity Database 2018 Version 2*³, tingkat peningkatan produktivitas kerja Indonesia pada 2016 lebih rendah daripada negara-negara sekitarnya, sehingga diperlukan upaya perbaikan. Untuk mendorong ekspor dalam rangka memperbaiki neraca perdagangan, meningkatkan produktivitas kerja dan daya saing industri amatlah penting. Seiring dengan upaya yang dilakukan saat ini untuk meningkatkan efisiensi kegiatan industri dan sumber daya manusia yang lebih baik, diperlukan upaya dalam meningkatkan industri pendukung yang menjadi sumber nilai tambah, menarik investasi perusahaan dengan teknologi canggih dan mendorong inovasi. Selain itu, perlu juga meningkatkan lingkungan yang lebih kompetitif pada pasar domestik dalam rangka meningkatkan daya saing industri, termasuk promosi PMA.

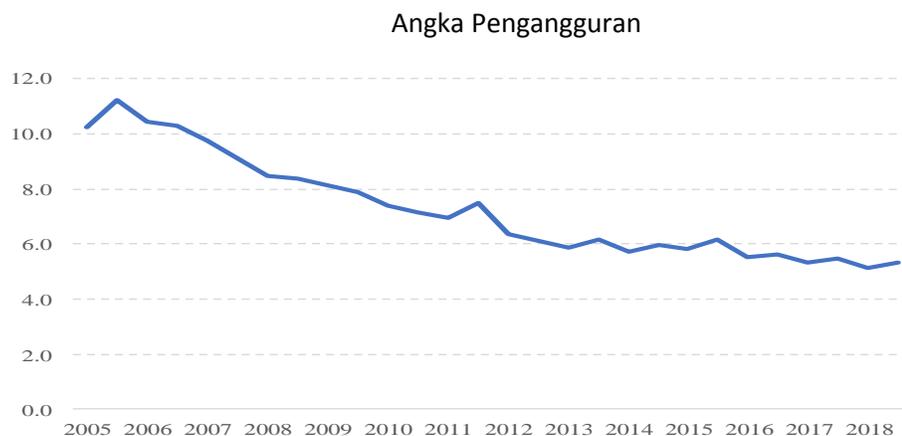
Peningkatan produktivitas kerja pada 2016	
Indonesia	1.37%
Malaysia	2.68%
Thailand	4.39%
Vietnam	5.28%



³ <https://www.apo-tokyo.org/wedo/productivity-measurement/>

2-3. Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja

Di Indonesia, tingkat pengangguran terus menurun sejak tahun 2005, dan kebijakan pemerintah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja cukup berhasil. Namun, tingkat pengangguran di beberapa daerah atau tingkat pengangguran pada usia muda dan lulusan SMK cukup tinggi. Pemerintah Indonesia berupaya mendorong penempatan tenaga kerja dengan meningkatkan tingkat pertumbuhan PDB. Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi tahun 2020-2024⁴ dari Bappenas memproyeksikan bahwa jika tingkat pertumbuhan PDB pada 2019 dapat mencapai 5,3 persen, maka tingkat pengangguran sebesar 5,34 persen (2018) dapat menurun menjadi 4,8-5,2 persen pada tahun 2019. Selain itu, ada inisiatif upaya promosi penempatan tenaga kerja terkait dengan pelatihan vokasi, seperti pemberdayaan SMK, program *link and match*, dll. Perusahaan Jepang anggota JJC juga menyadari bahwa upaya perluasan skala industri untuk menyerap tenaga kerja dan peningkatan pelatihan vokasi yang sedang dilaksanakan pemerintah Indonesia sangat efektif. Dengan terciptanya siklus yang baik melalui sinergi antara upaya peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan skala industri, diharapkan dapat memperluas pasar domestik dan promosi ekspor, yang pada gilirannya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

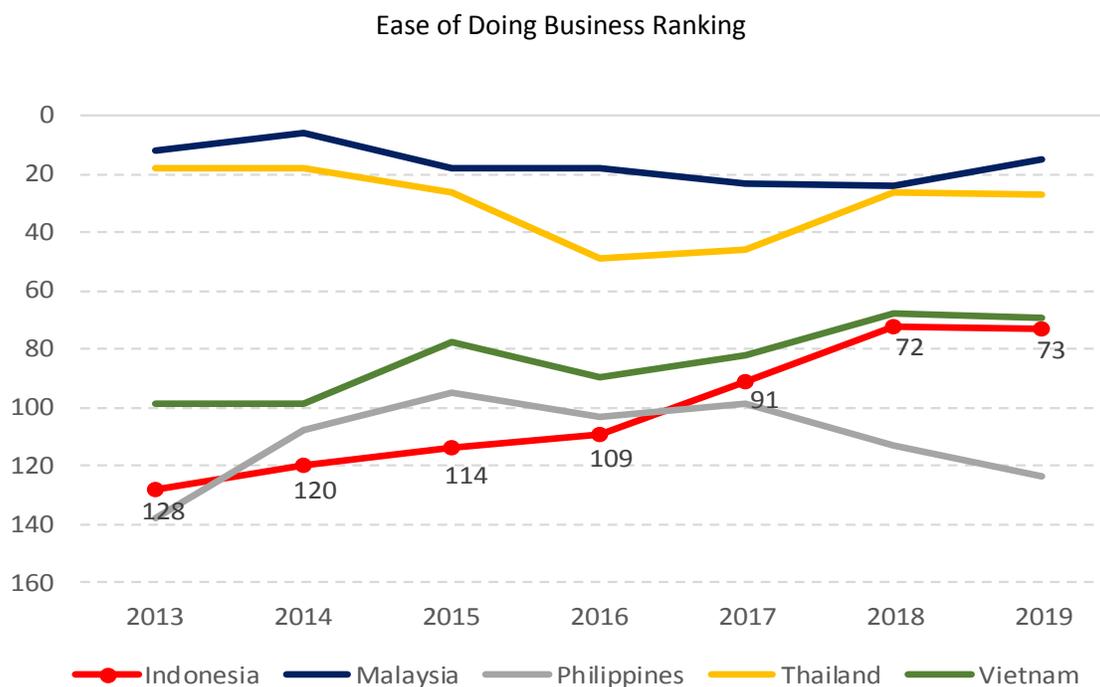


Sumber: Badan Pusat Statistik

⁴ http://binalattas.kemnaker.go.id/RAKOR-VOKASI-KL-2019/Bappenas_Evaluasi%20dan%20Kebijakan%20Vokasi%202020-2024_v0.pdf

2-4. Perbaikan Iklim Bisnis dan Daya Tarik untuk Investasi

Menurut “*Doing Business 2019*”⁵ dari Bank Dunia, peringkat Indonesia terus meningkat dan iklim bisnis dinyatakan terus membaik. Dalam survei⁶ JBIC, Indonesia menduduki posisi nomor lima di antara negara-negara dengan prospek baik dalam jangka menengah dan panjang dimana perusahaan Jepang tetap menganggap Indonesia memiliki daya tarik tetapi mulai kalah dengan Thailand dan Vietnam. Dalam survei⁷ JETRO, tingkat ekspansi bisnis dalam satu hingga dua tahun mendatang berada pada tren menurun. Dalam rantai pasokan global, rencana investasi baru atau perluasan akan dituju ke kawasan yang dianggap paling efektif berdasarkan analisis obyektif dari berbagai perspektif. Oleh karena itu, perusahaan Jepang yang melakukan kegiatan bisnis di Indonesia terus berupaya setiap saat untuk mencapai berbagai keberhasilan bersama-sama dengan Indonesia dan sangat mengharapkan bertambahnya investasi baru atau perluasan dari Jepang dengan adanya upaya perbaikan iklim bisnis dan daya tarik sebagai negara tujuan investasi. Selain itu, dengan adanya perbaikan iklim bisnis dan daya tarik untuk investasi, ditambah terciptanya siklus yang baik melalui upaya peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan skala industri secara sinergis sebagaimana diuraikan diatas, dapat diharapkan perluasan pasar domestik dan peningkatan ekspor menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.



Sumber: World Bank Report ‘Doing Business’

⁵ <https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2019>

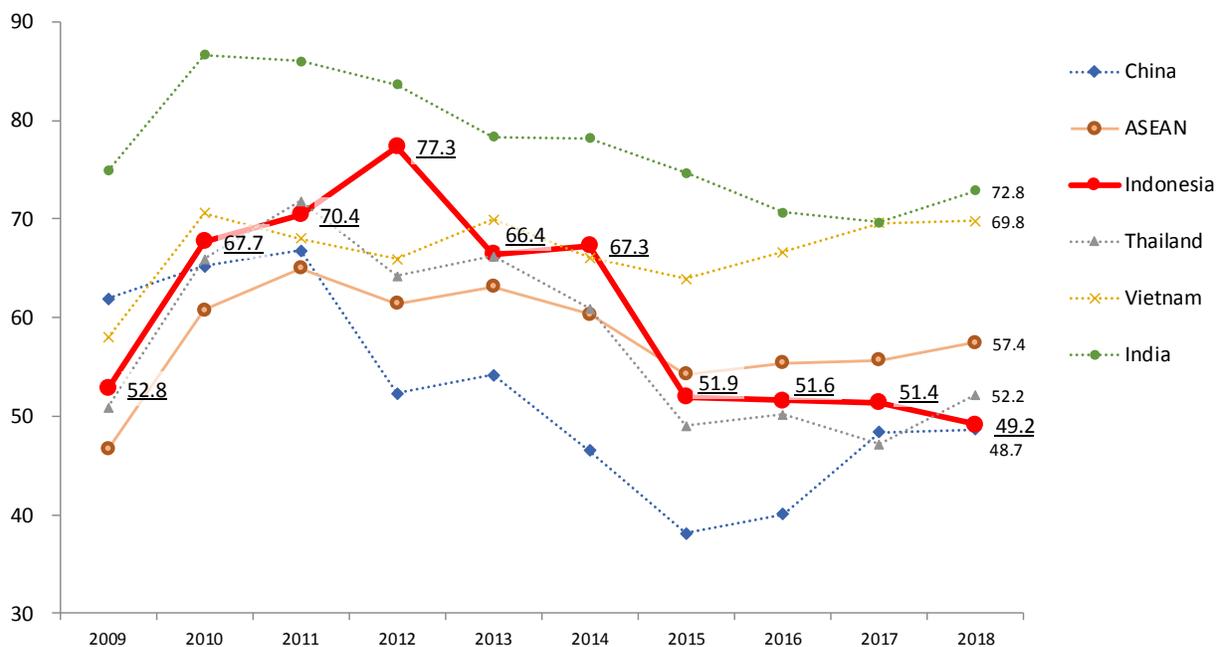
⁶ <https://www.jbic.go.jp/en/information/press/press-2018/1126-011628.html>

⁷ https://www.jetro.go.jp/ext_images/en/reports/survey/pdf/rp_firms_asia_oceania2018.pdf

JBIC Report 2018: Promising Countries/Regions for overseas business over medium-term

Ranking		Country/Region (Total)	No. of Companies		Percentage Share(%)	
2018	← 2017		2018	2017	2018	2017
			431	444		
1	← 1	China	225	203	52.2	45.7
2	← 2	India	199	195	46.2	43.9
3	↑ 4	Thailand	160	153	37.1	34.5
4	↓ 3	Vietnam	146	169	33.9	38.1
5	← 5	Indonesia	131	147	30.4	33.1
6	← 6	US	124	116	28.8	26.1
7	← 7	Mexico	59	81	13.7	18.2
8	← 8	Philippines	43	47	10.0	10.6
9	← 9	Myanmar	37	40	8.6	9.0
10	↑ 12	Malaysia	36	26	8.4	5.9
11	↑ 16	Germany	25	13	5.8	2.9
12	↓ 10	Brazil	24	28	5.6	6.3
13	↓ 10	Korea	22	28	5.1	6.3
14	← 14	Taiwan	19	17	4.4	3.8
15	↓ 13	Russia	16	19	3.7	4.3
16	↓ 14	Singapore	15	17	3.5	3.8
17	↑ 20	Cambodia	13	9	3.0	2.0
18	↓ 18	Australia	12	10	2.8	2.3
19	↓ 17	Turkey	9	12	2.1	2.7
20	↑ 23	Laos	7	5	1.6	1.1
20	↑ 32	France	7	2	1.6	0.5

JETRO Survey 2018: Proportions of firms expecting to expand in the next 1 to 2 years



2-5. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Lebih Lanjut

Pada masa pemerintahan Jokowi yang pertama, pembangunan infrastruktur secara aktif telah dilaksanakan. Pemerintah Jepang dan perusahaan Jepang juga berkontribusi terhadap pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Indonesia melalui proyek-proyek ODA dan kegiatan bisnis, seperti pembangunan MRT, Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Tanjung Priok, kawasan industri dsb. Menurut *The Global Competitiveness Report 2018*⁸ dari World Economic Forum, peringkat infrastruktur Indonesia berada di urutan ke-71, maka perlu dilanjutkan dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur lebih lanjut dibandingkan dengan negara-negara sekitarnya. Selain itu, dalam *Logistic Performance Index Global Ranking 2018*⁹ dari Bank Dunia, Indonesia berada di urutan ke-46, maka diperlukan juga upaya perbaikan logistik selain infrastruktur.

Infrastructure Ranking

Negara	Peringkat
Malaysia	32
Thailand	60
Indonesia	71
Vietnam	75
Filipina	92

Sumber: WORLD ECONOMIC FORUM, The Global Competitiveness Report 2018

Logistic Performance Index Ranking

Negara	Peringkat
Thailand	32
Vietnam	39
Malaysia	41
Indonesia	46
Filipina	60

Sumber: World Bank, Logistics Performance Index Global Ranking 2018



Sumber gambar: Mitsui & Co website

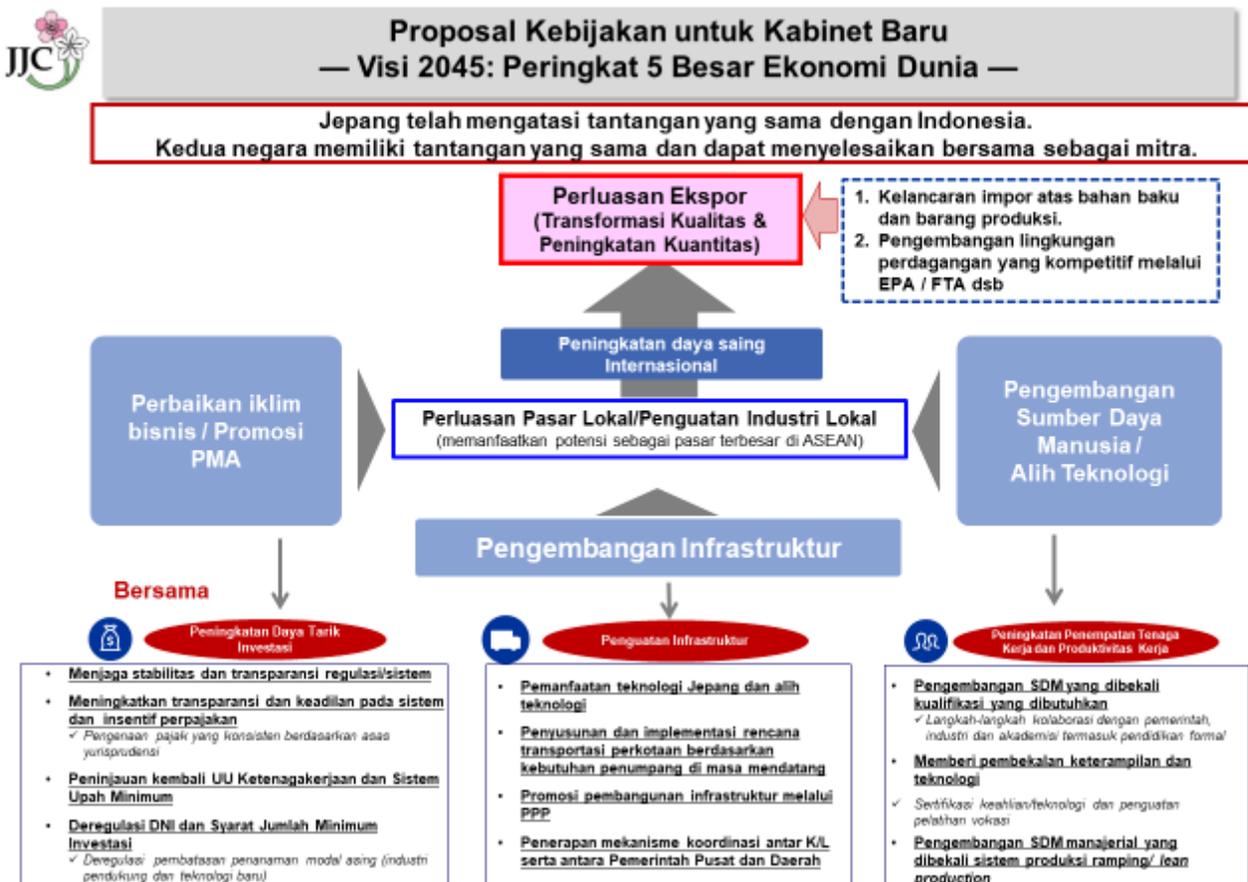
⁸ <https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2018>

⁹ <https://lpi.worldbank.org/international/global>

[Proposal Kebijakan dan Kontribusi JJC dalam rangka Indonesia Berada di 5 Ekonomi Terbesar Dunia pada tahun 2045]

Perusahaan-perusahaan Jepang selama proses pertumbuhan ekonomi tinggi di Jepang telah mengalami perjuangan menghadapi dan mengatasi masalah seperti yang terjadi di Indonesia. Perusahaan Jepang anggota JJC ingin berkontribusi pada pengembangan ekonomi Indonesia ke depan sebagai mitra yang dapat berbagi masalah dan menyelesaikannya bersama.

Untuk mengatasi masalah Indonesia dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan maksimum, perlu adanya upaya memperkuat daya saing internasional Indonesia melalui perluasan pasar domestik dan penguatan industri dalam negeri dengan memanfaatkan potensi pasar terbesar ASEAN melalui perbaikan iklim bisnis/promosi PMA, pengembangan sumber daya manusia/alih teknologi, dan pengembangan infrastruktur. Disamping itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diperlukan perluasan ekspor dengan cara melakukan transformasi kualitas industri dan meningkatkan kuantitas ekspor. JJC menyusun proposal kebijakan dan ingin berkontribusi agar Indonesia menjadi ekonomi 5 besar dunia pada tahun 2045.



1. Perbaikan Iklim Bisnis dan Promosi PMA

Untuk memperkuat daya saing internasional Indonesia dan perkembangan yang berkelanjutan, sangat diperlukan upaya optimalisasi kegiatan ekonomi yang ada saat ini serta mendorong pemberian input kegiatan ekonomi baru (berupa PMA). Apabila tidak dapat mendorong perluasan skala pasar pertumbuhan di pasar domestik dengan menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan membangun daya tarik sebagai basis ekspor, sulit bagi investor untuk memilih Indonesia sebagai tujuan investasi mengingat globalisasi kegiatan ekonomi saat ini. Dengan kata lain, yang diperlukan adalah iklim bisnis dengan transparansi, prediktabilitas dan fleksibilitas tinggi dalam melakukan bisnis, dan ketersediaan insentif pajak dan fasilitas lainnya. Selain itu, kondisi terbuka bagi PMA dan lingkungan yang kompetitif di pasar domestik sangat penting untuk memperkuat daya saing internasional. Perusahaan Jepang telah melakukan investasi secara terus-menerus di Indonesia. Jepang adalah investor PMA terbesar ke-2 dalam akumulasi realisasi investasi untuk PMA selama 10 tahun terakhir. Pada akhir 2018, nilai investasi telah mencapai kurang lebih 30 miliar USD. Dengan mempertimbangkan skala ekonomi Indonesia, dapat dikatakan Indonesia masih memiliki lebih banyak potensi PMA. Selanjutnya, melihat tren neraca investasi Jepang sejak akhir 2014, meskipun tingkat pertumbuhannya hampir sama dengan negara-negara sekitarnya, tingkat kenaikannya lebih besar di Vietnam dan Thailand daripada di Indonesia, sehingga kita dapat mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir wilayah tersebut dipilih untuk investasi dari Jepang.

Neraca PMA dari Jepang

Negara		Indonesia	Malaysia	Filipina	Thailand	Vietnam
Ease of Doing Business Ranking 2019 oleh World Bank Group		73	15	124	27	69
Neraca PMA dari Jepang (Unit : USD bil)	2018 (A)	30.39	16.63	14.52	68.97	16.97
	2014 (B)	23.77	13.74	11.17	52.59	12.01
	A-B	6.62	2.88	3.36	16.38	4.96
*Sumber Data: Bank of Japan	Growth Rate (A/B)	128%	121%	130%	131%	141%

(Proposal Kebijakan terkait Perbaikan Iklim Bisnis dan Promosi PMA)

• Memastikan Stabilitas dan Transparansi Kebijakan/Sistem

Topik diskusi yang paling sering diangkat di JJC adalah kebijakan/sistem yang baru/akan ditetapkan. Diantaranya banyak kasus dimana kebijakan/sistem yang tiba-tiba diumumkan tanpa memperhatikan konsistensi dengan peraturan K/L terkait atau tanpa adanya kejelasan terkait pemberlakuan peraturan pelaksanaan bagi wajib pajak bersangkutan, atau kami harus menindaklanjuti untuk meminta klarifikasi terhadap perbedaan penafsiran yang terjadi antara para pejabat di pemerintah. Dalam “*Foreign Investor Perspective and Policy Implication*”¹⁰ oleh Bank Dunia, dua faktor prioritas utama yang menentukan dalam mengambil keputusan investasi adalah stabilitas politik dan keamanan (*political stability and security*) dan lingkungan hukum peraturan perundang-undangan (*legal and regulatory environment*). Oleh karena itu, memastikan stabilitas dan transparansi kebijakan/sistem tidak hanya menjadi fondasi dalam operasional bisnis yang stabil bagi pelaku usaha lokal saja,

¹⁰<http://documents.worldbank.org/curated/en/169531510741671962/Global-investment-competitiveness-report-2017-2018-foreign-investor-perspectives-and-policy-implications>

tetapi juga sangat penting untuk menarik PMA baru yang membawa inovasi yang diharapkan berkontribusi pada pertumbuhan berbasis ekspor.

• Perbaikan Sistem Perpajakan Transparan dan Adil, Perluasan Insentif Pajak yang Kompetitif secara Internasional, Peningkatan Rasio Cakupan Wajib Pajak dan Perluasan Dasar Pengenaan Pajak

Terkait upaya perbaikan sistem perpajakan yang transparan dan adil, kami merekomendasikan secara konkret hal berikut .

Pertama, administrasi pajak berdasarkan aturan yang jelas dan dapat diprediksi merupakan hal penting bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha di Indonesia dengan lancar, tetapi pada tahun fiskal 2016 jumlah kasus pajak yang dibawa ke pengadilan pajak di Indonesia adalah 12.852, jumlah yang sangat besar, dibandingkan dengan Jepang sebanyak 245 kasus. Disamping itu, dalam banyak kasus membutuhkan waktu lama sampai putusan ditetapkan, dimana hal tersebut merupakan beban besar bagi perusahaan Jepang anggota JJC yang menjalankan bisnis di Indonesia. Di Jepang, badan peradilan pajak didirikan dan diterapkan sejak 50 tahun lalu. Badan ini memungkinkan berjalannya administrasi perpajakan yang wajar melalui penyelesaian kasus dengan cepat dan tepat, pengumuman putusan kepada publik, sehingga terwujud pengenaan pajak yang wajar berdasarkan asas yurisprudensi. Untuk mewujudkan administrasi pajak berdasarkan aturan yang jelas dan dapat diprediksi, sebaiknya Indonesia melakukan transformasi sistem perpajakan berdasarkan asas yurisprudensi. JJC bersedia mendukung upaya Indonesia untuk hal tersebut.

Selanjutnya, administrasi pajak yang terbelenggu target penerimaan pajak mungkin menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus di pengadilan pajak. Dapat dipertimbangkan pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan sebagai lembaga independen dalam rangka memfasilitasi administrasi pajak berdasarkan aturan hukum dan yurisprudensi.

Salah satu contoh aturan yang tidak jelas adalah bunga atas pengembalian pajak karena kelebihan pembayaran. Berdasarkan Ketentuan Umum dan Prosedur Prosedur Perpajakan (KUP), jika keberatan atas nilai dalam pembetulan disetujui, maka ditetapkan pembayaran oleh pemerintah pusat sebesar 2 persen imbalan bunga, tetapi peraturan pemerintah menambahkan ketentuan bahwa jika pembayaran dilakukan sebelum wajib pajak mengajukan keberatan, tidak dikenakan imbalan bunga. Kasus tersebut merupakan kasus dimana peraturan yang lebih rendah menetapkan ketentuan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Seharusnya konsistensi harus dijamin sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, apabila nilai dalam pembetulan yang belum dibayar pada saat keberatan diajukan, yang kemudian ditolak atau tidak dikabulkan, maka denda dikenakan sebesar 50 persen terhadap nilai dalam pembetulan yang belum dibayar. Oleh karena itu, wajib pajak harus membayar sebelum keberatan diajukan. Namun demikian, sebagaimana diuraikan di atas, peraturan pemerintah mengatur ketentuan imbalan bunga tidak berlaku dalam hal tersebut, yang membuat beban bunga bagi wajib pajak dalam hal penetapan putusan memakan waktu yang lama.

Wajib Pajak juga harus memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dalam rangka mendukung mewujudkan keuangan nasional yang sehat sebagai fondasi negara. Untuk memberi pemahaman hukum perpajakan yang rumit dengan benar dan memfasilitasi pembayaran pajak dengan benar, sebaiknya mendorong ketersediaan ahli di bidangnya yaitu konsultan pajak dan akuntan publik. Dalam hal ini Jepang memiliki sekitar 60.000 pegawai pajak, sedangkan di Indonesia jumlahnya masih terlalu kecil yaitu sekitar 30.000 orang.

Diperlukan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas wajib pajak dalam pemberitahuan pajak dan penyempurnaan sistem.

Terkait upaya perluasan insentif pajak yang bersaing secara internasional, dengan konkret kami merekomendasikan hal berikut .

Di tengah-tengah revolusi digital yang berkembang dalam semua aspek masyarakat, yang disebut Revolusi Industri 4.0, bukan hanya Indonesia, tetapi setiap negara mempromosikan dan bersaing dalam penelitian dan pengembangan di perusahaan, riset dasar dengan cakupan yang luas, dan riset rekayasa teknologi untuk menciptakan inovasi. Dalam kondisi tersebut, insentif PPh badan yang diluncurkan tahun ini dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan kegiatan litbang (PP Nomor 45 Tahun 2019), pemerintah dan swasta secara bersama-sama harus mendorong pemanfaatannya secepat mungkin dengan memperjelas persyaratan penerapan, memperlonggar persyaratan dll. Selain itu, untuk lebih memperluas dan memperkuat industri pendukung yang dikembangkan selama ini terutama di bidang manufaktur, penting dipertimbangkan untuk menghilangkan atau menurunkan jumlah investasi minimum dalam persyaratan tax holiday (100 miliar rupiah), serta memperjelas dan memperlonggar persyaratan untuk mempromosikan investasi baru.

Selain itu, untuk merangsang arus PMA ke Indonesia dan mengembangkan kluster industri, karena perusahaan global memilih negara tujuan investasi untuk pengembangan bisnisnya, ketersediaan insentif pajak di masing-masing negara adalah kriteria penting dalam pengambilan keputusan, maka diperlukan untuk melakukan perbandingan insentif pajak di negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dll dan melakukan upaya perbaikan terus-menerus. Misalnya, Malaysia yang mengalami surplus neraca perdagangan dan neraca berjalan terus berlanjut karena terbentuknya kluster industri elektronika dan ekspor, pengurangan pajak untuk pengeluaran modal yang memenuhi syarat sebesar 60 persen, sedangkan di Indonesia sebesar 30 persen. Untuk tarif PPh badan bagi UKM sebesar 17 persen, sedangkan di Indonesia 25 persen. Perlakuan tersebut jarang terjadi di dunia, maka sangat diperlukan untuk dihapus atau diturunkan tarif PPh22 yang menjadi beban dalam arus kas wajib pajak dan mengubah metode perhitungan dan pembetulan untuk taksiran pajak berdasarkan PPh25.

Terkait peningkatan rasio cakupan wajib pajak dan perluasan dasar pengenaan pajak, secara konkret kami merekomendasikan hal berikut ini.

Dalam rangka mewujudkan perkembangan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan, diperlukan sumber pembiayaan yang adil dan stabil untuk perbaikan infrastruktur. Mengenai pajak langsung, jumlah penduduk bekerja 133 juta orang, tetapi hanya 18 juta orang yang merupakan wajib pajak, sehingga rasio cakupan wajib pajaknya rendah. Mengingat masih memerlukan upaya peningkatan jumlah pegawai pajak dalam rangka mewujudkan pemungutan pajak dengan adil, maka untuk saat ini kiranya lebih baik untuk menaikkan tarif pajak tidak langsung (PPN) karena basis pengenaan pajaknya yang lebih luas.

Selain itu, melalui promosi e-government di bidang perpajakan lebih lanjut, diperlukan upaya untuk memperbaiki biaya administrasi melalui peningkatan efisiensi dan penyederhanaan prosedur dan meningkatkan rasio cakupan wajib pajak dengan menciptakan lingkungan yang memudahkan pembayaran pajak.

• Mengatasi Masalah Penempatan Tenaga Kerja melalui Revisi UU Ketenagakerjaan, Penyempurnaan Sistem Upah Minimum dan Perluasan Sistem Jaminan Sosial

Agar perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat mengelola bisnis yang bersaing secara internasional, di bidang ketenagakerjaan dan jaminan sosial, kami merekomendasikan hal berikut:

- 1) Meskipun di satu sisi UU Ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja, tetapi di sisi lain UU tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan mendapatkan sumber daya manusia yang handal sesuai kebutuhan dunia bisnis. Oleh karena itu, seharusnya menetapkan standar minimum dalam rangka penempatan tenaga kerja.
- 2) Upah minimum harus secara tegas diposisikan sebagai bagian dari jaring pengaman, dan pemerintah pusat yang menetapkan upah minimum untuk setiap provinsi, kabupaten/kota. Selibuhnya hilangkan semua jenis upah minimum, termasuk upah minimum sektoral.
- 3) Mengenai sistem pengupahan, membangun sistem pengupahan berdasarkan produktivitas kerja, yang dapat disesuaikan dengan pola kerja satuan waktu dan satuan hasil, dan meninjau ulang upah lembur agar menjadi tingkat yang standar
- 4) Terkait jaminan PHK, pada dasarnya harus bisa ditetapkan secara independen oleh masing-masing perusahaan, dan jika diatur oleh peraturan perundang-undangan, hanya standar minimum yang diatur. Selain itu, dalam rangka melindungi pekerja, menyempurnakan sistem jaminan sosial yang mencakup asuransi pengangguran sehingga mencakup jaminan PHK yang ada saat ini sehingga memungkinkan penempatan tenaga kerja dan PHK dengan mudah, tepat dan lancar. Selain itu, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang dibutuhkan, dilaksanakan berbagai program pengembangan sumber daya manusia dan program peningkatan produktivitas kerja yang dananya bersumber dari biaya jaminan sosial.
- 5) Promosi PMA dan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) tidak dapat dipikirkan secara terpisah. Agar dapat mendorong dan menjaga PMA, diperlukan kebijakan untuk menghilangkan atau memperlonggar pembatasan penggunaan TKA yang memiliki kompetensi/keterampilan tertentu. Selain itu, pengendalian TKA dalam permohonan pemberian/pembaharuan/penghapusan izin kerja/visa, dll, dilakukan oleh satu instansi pemerintah (misalnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kementerian Tenaga Kerja) sehingga dapat melakukan pengurusan dengan tepat dan lancar..
- 6) Menyeragamkan perlakuan K/L terhadap TKA dan orang asing sepanjang mereka telah mendapatkan izin kerja atau visa untuk bisnis yang sesuai, agar dapat melaksanakan kegiatan dimanapun di wilayah RI yang diperkenankan sesuai aturan yang berlaku.

• Memperlonggar aturan Daftar Negatif Investasi (DNI) dan Penghapusan Pembatasan Sektoral diluar DNI

Menurut Catatan Kebijakan Bank Dunia “*what drives Foreign Direct Investment in Indonesia?*”¹¹ korelasi antara deregulasi dan promosi investasi telah terbukti. Selain itu, “*Foreign Investor Perspective and Policy Implications*” oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa PMA memiliki dampak positif kepada pelaku usaha lokal di negara bersangkutan. Selain itu, “*OECD Investment Policy Reviews Southeast Asia*”¹² mengemukakan bahwa sejak tahun 2010 deregulasi untuk PMA berkembang lebih jauh di Malaysia dan Vietnam daripada di Indonesia, dan semakin ketat pengaturan di sektor jasa, produktivitas kerja semakin rendah. Selain itu, “*Service Sector Reform and Manufacturing Productivity: Evidence from Indonesia*”¹³ menunjukkan bahwa biaya logistik di Indonesia tinggi karena pengaturan di bidang jasa, yang juga memberikan dampak negatif pada produktivitas di manufaktur. Selain itu, di Indonesia sektor-sektor tertentu yang memiliki aturan pembatasan dengan peraturan menteri dll yang menyulitkan investor dalam mengambil keputusan investasi. Misalnya, perusahaan jasa pengurusan transportasi asing, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 47/2015 dan No. 49/2017, wajib memiliki jumlah modal minimum yang khusus berlaku untuk sektor bersangkutan dan tidak diperkenankan memiliki izin usaha lebih dari satu (*multilicense*). Selain itu, RUU Pertembakauan saat ini sedang dibahas. RUU tersebut tidak hanya akan menetapkan bea masuk tembakau impor, tetapi akan membatasi modal maksimal untuk asing sebesar 30 persen, juga terdapat ketentuan yang memungkinkan diluar pengecualian aturan (*grandfather clause*). Memperlonggar ketentuan DNI dan penghapusan pembatasan sektoral di luar DNI diperlukan untuk promosi investasi. Selama ini JJC telah mengusulkan berbagai isu antara lain, meminta klarifikasi penafsiran aturan di sektor konstruksi, pelonggaran pembatasan pada luas lantai penjualan sesuai kondisi bisnis yang nyata di sektor ritel, pelonggaran peraturan tentang perusahaan jasa pengurusan transportasi dalam rangka mendorong penurunan biaya logistik dan efisiensi.

• **Memperlonggar Sebagian Aturan terkait Modal Minimum untuk PMA**

Di Indonesia, sejumlah kecil pun modal asing yang masuk diklasifikasikan sebagai modal asing, dan semua perusahaan PMA diperlakukan sebagai perusahaan besar sehingga diperlukan penyeteroran modal 10 miliar rupiah. Nilai investasi minimum tersebut lebih besar dibandingkan dengan negara-negara sekitarnya dan dapat menghambat investasi. Misalnya, menurut “*Mizuho Financial Group-MIZUHO Research & Analysis No. 12, 2017*”¹⁴, dalam industri otomotif Thailand memiliki 1.700 Tier 2-3 perusahaan sedangkan Indonesia hanya memiliki 1.000, padahal jumlah OEM dan perusahaan Tier 1 setara antara Thailand dengan Indonesia. Jika perusahaan Tier 2-3 dengan jumlah setara dengan Thailand yang akan masuk di Indonesia, investasi baru oleh 700 perusahaan akan diharapkan pada industri pendukung dalam industri otomotif saja. Apabila dipekerjakan tenaga kerja rata-rata 200 orang berdasarkan asumsi data JETRO, maka dimungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 140.000 orang. Selain itu, perusahaan di sektor digital, sektor kreatif dan sektor teknologi baru yang sifatnya tersegmentasi (*niche*) diperkirakan tidak memerlukan investasi besar dalam peralatan dll. Oleh karena itu, dengan memperlonggar pembatasan modal minimum mungkin akan mendorong penguatan industri pendukung dan menarik investasi sektor teknologi baru di Indonesia.

¹¹ <http://documents.worldbank.org/curated/en/360411540797707636/Policy-Note-What-drives-Foreign-Direct-Investments-in-Indonesia>

¹² <https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/Southeast-Asia-Investment-Policy-Review-2018.pdf>

¹³ <http://documents.worldbank.org/curated/en/207801468049736587/Service-sector-reform-and-manufacturing-productivity-evidence-from-Indonesia>

¹⁴ <https://www.mizuho-fg.co.jp/company/activity/onethinktank/vol012/pdf/06.pdf>

• Deregulasi/Insentif untuk Investasi di Bidang Energi untuk Energi Terbarukan dll

“APEC Energy Demand and Supply Outlook 7th Edition 2019”¹⁵ mengutarakan bahwa permintaan energi di Indonesia akan terus meningkat, dan Indonesia adalah salah satu pengekspor batubara dan LNG terkemuka di dunia, sehingga akan diperlukan penyeimbangan sumber daya energi antara ekspor dan permintaan domestik yang bertumbuh cepat. Menurut dokumen dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, gas alam yang saat ini dalam posisi ekspor dapat beralih ke posisi impor pada tahun 2025 karena meningkatnya permintaan domestik, sehingga ada kemungkinan neraca perdagangan akan memburuk juga di bidang energi. Selain itu, perlu juga mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai langkah mengantisipasi pemanasan global, dimana dikemukakan polusi udara menjadi masalah di Indonesia akhir-akhir ini. Selain itu, pada bulan Agustus 2019, pemadaman listrik yang meluas terjadi di Jawa, yang memberikan dampak besar pada kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, penting untuk berupaya mendorong pengembangan sumber daya energi lebih lanjut, penerapan energi bersih seperti energi terbarukan, dan penguatan pembangkit dan sistem kelistrikan. Untuk mempromosikan hal tersebut, memfasilitasi masuknya PMA dan sektor swasta akan menjadi efektif. Sebagai contoh, investasi dalam energi terbarukan memiliki potensi besar, tetapi dengan penetapan harga FIT saat ini, sangat sulit bagi perusahaan swasta untuk berinvestasi. Kami berharap harga FIT dapat ditinjau kembali, sehingga akan menjadi insentif yang menarik untuk investasi. Lebih lanjut, mengenai investasi di sektor pembangkitan, kami berharap adanya upaya fasilitasi melalui pengalihan/penjualan saham sebelum tanggal operasi komersial (COD), klarifikasi tentang pembagian risiko saat terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), klarifikasi tentang sistem lelang dan jenis kontrak, serta keterbukaan dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan pelaksanaan dan pedoman terkait dengan PP No. 14 2017.

¹⁵ <https://aperc.ieej.or.jp/publications/reports/outlook.php>

ASEAN Regulation Comparison

		Indonesia		Thailand	Vietnam
		Ministry			
NEGATIVE LIST for foreign investors					
*Presidential Decree No.44/2016 (DNI)					
(1) CONSTRUCTION	<For only Public Project > Contract amount > Rp 50 billion	BKPM, PUPR	<Project requiring the use of special technology, expertise, etc.> Minimum capital: THB 500 million (Equivalent to IDR 225 billion)	Not Regulated	Not Regulated
(2) RETAIL	Store space > 2,000m ²	BKPM, TRADE	Total minimum capital: THB 100 million (Equivalent to IDR 45 billion); or Minimum capital of each store : THB 20 million (Equivalent to IDR 9 billion)	Not Regulated except...	Not Regulated except... Cigarettes, Sugars, Pharmaceutical products, Precious metals & stones
TAX					
(1) PPh22 *No.110/PMK.010/2018	Import goods price × 2.5%		Not Regulated	Not Regulated	Not Regulated
(2) PPh25 *No.208/PMK.03/2009	Monthly Based on previous year's tax amount penalty	FINANCE	semi-annual Based on Taxpayer's own estimation in case that estimation<actual amount×75%	Quarterly Based on Tax payer's own estimation in case that estimation<actual amount×80%	Based on Tax payer's own estimation in case that estimation<actual amount×80%
MINIMUM CAPITAL REGULATION					
*BKPM Decree No.6 / 2018 *SME Law No.20 / 2008	Total Investment: IDR 10 billion Paid-up Capital: IDR 2.5 billion	BKPM	Minimum Capital: THB 2million (Equivalent to IDR 0.9 billion)	Not Regulated except...	Not Regulated except... Financial services, Telecommunication, Hospital, Property, Marine transport, Air transport
FORWARDING					
*Reg. of Minister of Transportation No.49 / 2017					
(1) Obtain Multi Licenses	Prohibited	BKPM, TRANSPORTATION	Not Regulated	Not Regulated	Not Regulated
(2) Max Foreign Capital share	67%		International: 100% Domestic: 50%		
(3) Min Paid-up Capital	USD 1mil		Not Regulated		
ELECTRICITY					
*MEMR Reg 50/2017					
(1) JETI price (Solar)	6.68(US cents/kWh)*	ESDM	18.1(US cents/kWh)	9.35(US cents/kWh)	9.35(US cents/kWh)
(2) Renewable Energy ratio	5.9%(3,740MW)		16.8%(7,400MW)	1.5%(590MW)	1.5%(590MW)

*Tariff is determined based on the Area Basic Generation Cost(BPP). 6.68(US cents/kWh) is 85% of national average BPP

(Tindakan JJC)

• Pertukaran Pendapat dengan Pemerintah Indonesia secara Berkesinambungan

Banyak kajian dari berbagai perspektif diperlukan untuk perbaikan iklim bisnis dan promosi PMA. Agar kajian oleh pejabat pemerintah Indonesia dapat dilaksanakan dengan lancar, perusahaan Jepang anggota JJC akan melakukan pertukaran pendapat dengan pemerintah Indonesia secara berkesinambungan. Selain itu, kami bersedia memberikan informasi jika diperlukan.

• Sosialisasi tentang Kebijakan/Sistem untuk Perusahaan bekerjasama dengan pihak Pemerintah Indonesia

Selain merekomendasikan untuk memastikan stabilitas dan transparansi kebijakan/sistem, kami menyadari juga perlu untuk memfasilitasi anggota kami untuk meningkatkan pemahaman tentang kebijakan/sistem agar mereka dapat mengambil tindakan yang tepat. Oleh karena itu, kami secara aktif mengadakan sosialisasi bekerjasama dengan pemerintah Indonesia mengenai kebijakan/ sistem.

• Seminar dan/atau Penyebarluasan Informasi tentang Promosi Investasi

Perusahaan Jepang anggota JJC sebagai bagian dari komunitas yang ada di Indonesia akan secara aktif mengadakan seminar dan/atau menyebarluaskan informasi mengenai promosi investasi.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Alih Teknologi

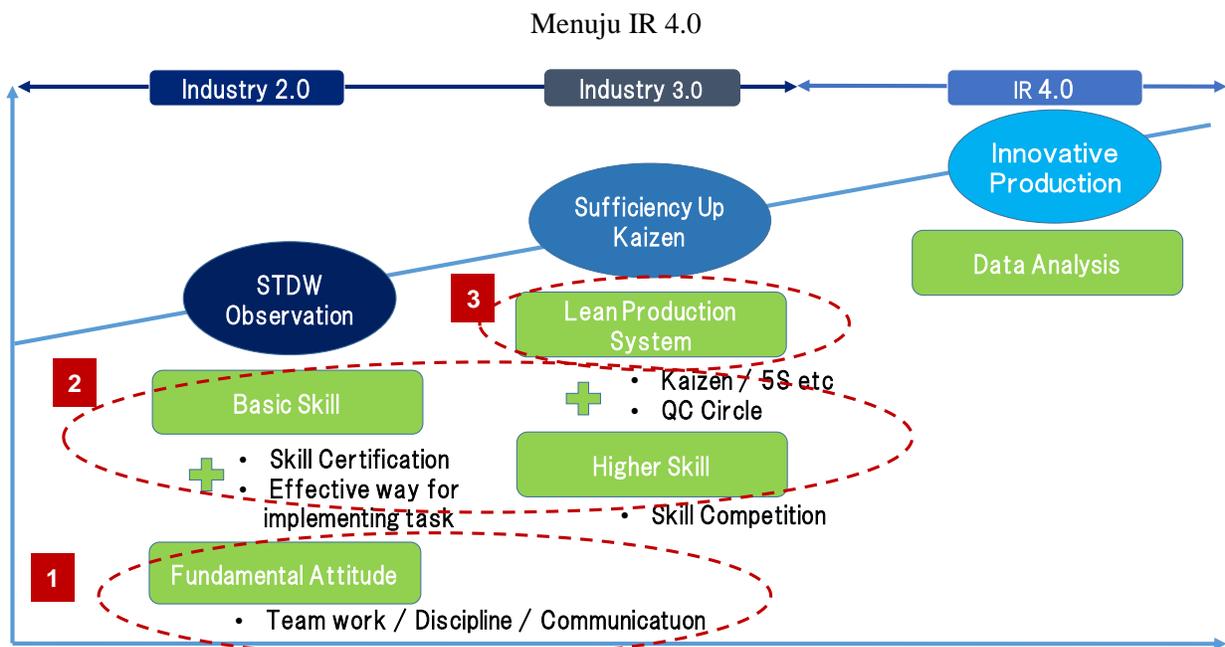
Dalam Pemerintahan Jokowi, pengembangan sumber daya manusia sangat dipromosikan sebagai salah satu program prioritas yang terpenting. Bagi perusahaan Jepang anggota JJC juga perlu untuk “menghasilkan yang lebih baik” dan untuk itu mutlak diperlukan peningkatan produktifitas lebih lanjut dalam rangka memperkuat daya saing internasional Indonesia dan mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam hal ini, “mengembangkan sumber daya manusia” adalah fondasi yang paling penting.

Pendiri perusahaan Jepang yang sukses secara global memberikan pesan, “Bisnis adalah cerminan manusianya”, “pembuatan sebuah produk [*monozukuri*] berbasis pada pembentukan (pengembangan) manusia”. Pesan tersebut telah diturunkan ke perusahaan Jepang sampai saat ini dan telah berakar luas tidak hanya di perusahaan besar, tetapi dalam bisnis UKM. Sebagai contoh di bidang manufaktur, didasarkan pada gagasan bahwa sejauh mana terjadi kemajuan mekanisasi, manusia yang membuat bisnis dan membuat produk, maka jika kita tidak membina manusianya, kita tidak dapat menjalankan bisnis. Perusahaan Jepang menghabiskan waktu yang lama melalui pekerjaan tangan/manual, mengembangkan dengan seksama prinsip-prinsip dan aturan *monozukuri*, mengembangkan kompetensi (keterampilan dan keahlian), dan terus-menerus mengejar metode manufaktur yang efisien dengan memanfaatkan keterampilan dan keahlian tersebut, akhirnya mampu menghasilkan produk yang bersaing secara internasional. Tentu saja, penting untuk terus mengembangkan pengetahuan manufaktur dan manajemen setiap waktu, dan upaya perbaikan (*kaizen*) tiada kata henti. Kami berpikir bahwa mengalihkan keterampilan dan keahlian, metode-metode manufaktur yang efisien yang dikembangkan oleh perusahaan Jepang yang bergerak di bidang manufaktur di Indonesia dalam bentuk yang sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia akan memberikan kontribusi besar terhadap Indonesia menjadi

ekonomi 5 besar dunia. Di sisi lain, kami juga berpikir bahwa untuk mencapai hal tersebut akan membutuhkan kesabaran dan upaya berkelanjutan dalam jangka waktu menengah sampai panjang.

Pada tahun 2018, perusahaan Jepang anggota JJC telah menciptakan lapangan kerja untuk 7,2 juta orang, dan lebih dari 90 persen perusahaan Jepang melakukan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, mereka juga berkontribusi secara eksternal, tidak hanya melakukan pengembangan sumber daya manusia untuk karyawan mereka sendiri, mereka juga memberikan perusahaan pemasok yang dikelola pengusaha lokal dengan bimbingan teknis dan sebagainya. Perusahaan Jepang anggota JJC tidak hanya melatih aspek teknis, tetapi untuk memaksimalkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia dalam persaingan global, mereka turut melakukan pengembangan sumber daya manusia dengan membekali kualifikasi yang dibutuhkan dalam industri dalam rangka mengoptimalkan kemampuan mereka yaitu: kemandirian, komunikasi, kerja tim, dan 5S (Rajin, Rawat, Resik, Rapi dan Ringkas). Selain itu, sebagai bagian dari kontribusi untuk pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi, melalui ODA Jepang, mereka berkontribusi dalam memastikan ketersediaan jumlah siswa yang memadai dan meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian melalui kerjasama teknis dan pemberian pinjaman yen untuk peningkatan fasilitas pendidikan dan peningkatan kemampuan riset di departemen teknik untuk Institut Teknologi Bandung, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Gadjah Mada.

Di tengah lingkungan ini, dunia industri saat ini dikatakan dalam keadaan Revolusi Industri 4.0 melalui inovasi drastis alat-alat TI. Tiga langkah diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut yaitu: (1) Membekali perilaku dasar seperti disiplin dan kerja tim, (2) Memperoleh keterampilan berdasarkan pembekalan tersebut, (3) Secara efisien memanfaatkan keterampilan tersebut sebagai sebuah organisasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Dengan fondasi tersebut, Revolusi Industri 4.0 baru akan menghasilkan efek, yang mengarah pada penguatan perusahaan Indonesia dan pengembangan sumber daya manusia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kami merekomendasikan hal berikut ini.



(Proposal Kebijakan terkait Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Alih Teknologi)

• Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Membekali Kualifikasi (disiplin, pengetahuan dasar) yang Dibutuhkan di Tempat Kerja Manufaktur [1]

Yang dibutuhkan bagi karyawan yang bekerja di tempat kerja manufaktur adalah (1) ketaatan disiplin, (2) kerja tim dan (3) pengetahuan akademik dasar, terutama kemampuan berpikir logis matematis. Perusahaan juga harus melakukan pelatihan kerja, tetapi jika tersedia dengan jumlah cukup sumber daya manusia yang telah dibekali hal-hal tersebut sebelum dipekerjakan, perusahaan dapat berfokus pada langkah berikutnya, yaitu pembekalan teknik dan keterampilan sehingga percepatan pengembangan sumber daya manusia dapat diharapkan. Kalau di Jepang pendidikan sekolah yang menekankan perspektif tersebut telah dilaksanakan. Di Indonesia, pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan secara bersama-sama perlu berkolaborasi untuk mempertimbangkan pola yang tepat untuk pendidikan formal untuk ke depan.

Selain itu, di SMU, SMK, dan universitas yang mencetak sumber daya manusia dengan keahlian khusus untuk berbagai pekerjaan, di samping kualifikasi dasar yang dijelaskan di atas, hal terpenting lainnya adalah tersedianya pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Masalah tersebut sudah menjadi isu di dalam **KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI** Bappenass 2020-2024. Diperlukan pemercepatan pelaksanaan program untuk mendukung pendidikan *monozukuri* yang sekarang dilakukan melalui kolaborasi antara industri, SMK, dan universitas.

• Penguasaan Keterampilan dan Teknik Lebih Lanjut [2]

Untuk melakukan *monozukuri*, keterampilan yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan sangatlah penting. Penting untuk mendapatkan dan meningkatkan “keterampilan” (tenaga terampil) yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan menghasilkan produk dan “teknik” yang diperlukan (teknisi) untuk merancang produk dan memutuskan proses pembuatannya. Hal tersebut adalah salah satu unsur penting yang mendasar untuk meningkatkan produktivitas kerja Indonesia.

Untuk melakukan itu, sangat penting memperkaya pelatihan vokasi dan kerangka kerja untuk memastikan tingkat keterampilan. Saat ini, kompetensi kerja yang dikembangkan perusahaan atau organisasi internasional mulai disertifikasi atas pengakuan BNSP. Kami merekomendasikan untuk mengembangkan sistem sertifikasi keterampilan secara menyeluruh dengan memberdayakan sistem yang sudah ada sebagaimana disebut diatas secara efektif di tingkat nasional untuk diperluas penerapannya di setiap industri

Selain itu, untuk memperkaya fondasi usaha yang mendukung kegiatan perusahaan yang stabil, misalnya, ketersediaan ahli hukum dan perpajakan lebih lanjut dapat diharapkan. Untuk memahami hukum perpajakan yang berbelit-belit dengan benar dan menyampaikan pemberitahuan pajak dengan benar, diharapkan agar tersedianya konsultan pajak dan akuntan publik yang memadai sebagai spesialis yang mendukungnya.

• Pengembangan Sumber Daya Manusia Manajerial yang Mampu Melakukan Operasi di Tempat Kerja Manufaktur yang Efisien (*Lean Production System*) [3]

Peningkatan produktivitas secara drastis tidak dapat diharapkan hanya dari sumber daya manusia yang telah memperoleh kualifikasi yang dibutuhkan manufaktur untuk meningkatkan keterampilan dan teknik. Yang lebih

penting adalah adanya tenaga manajerial yang dapat memperdayakan sumber daya manusia yang telah dibekali keterampilan tinggi secara efisien dan memaksimalkan hasil di organisasinya. Manajemen yang dapat memaksimalkan hasil di organisasi disebut *lean production system* (sistem produksi ramping), dan mengembangkan banyak sumber daya manusia seperti itu akan mengarah pada peningkatan produktivitas manufaktur di Indonesia secara keseluruhan.

Untuk pengembangan sumber daya manusia industri di Indonesia, perusahaan Jepang anggota JJC berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian RI untuk memberikan bantuan berdasarkan sistem produksi ramping di perusahaan casting di Jawa Tengah. Namun, pengembangan sumber daya manusia manajerial tidak terjadi dalam semalam, dan penting untuk memiliki inisiatif di mana setiap instruktur dengan sabar membimbing setiap individu melalui OJT dan praktek kerja.

Untuk itu, mempelajari teori sistem produksi ramping di ruang kelas saja tidak cukup. Bimbingan dan pelatihan melalui praktek di setiap tempat kerja adalah hal yang paling penting. Untuk memperkuat daya saing Indonesia dengan meningkatkan produktivitasnya, kami sarankan untuk mengembangkan tenaga manajerial yang mengarah pada praktek.

(Tindakan JJC)

Dukungan untuk Industri Pendukung oleh Indonesia Mold and Dies Industry Association (IMDIA)

Perusahaan Jepang anggota JJC memberikan banyak dukungan dalam operasional IMDIA. Dari tahun 2007 sampai tahun 2018, sebanyak 593 calon instruktur lulus ujian dan secara total telah mencetak 3556 instruktur. Di masa depan diupayakan untuk memproduksi mold dan dies yang lebih canggih di Indonesia dalam rangka berkontribusi pada peningkatan kandungan lokal..

[Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Tingkat Pendidikan Tinggi dan SMK]

- **TOYOTA Indonesia Academy and SMK Mitra Industri MM2100**

TOYOTA Indonesia Academy menerima lulusan SMK untuk mengembangkan teknisi pemeliharaan yang membutuhkan pengetahuan luas dan mendalam agar menjadi sumber daya manusia yang dapat memimpin industri otomotif Indonesia di masa depan, termasuk pembekalan sikap dan perilaku. Selain itu, SMK Mitra Industri MM2100 berupaya untuk meningkatkan kualifikasi yang dibutuhkan dalam industri manufaktur seperti ketaatan disiplin, pengetahuan akademik dasar dll terutama dengan menerima penduduk lokal setempat.

- **Pelaksanaan Pelatihan bagi Pengajar SMK**

JETRO dan AOTS, bekerjasama dengan Ministry of Economic, Trade and Industry (METI) Jepang, Kementerian Perindustrian RI dan IMDIA melaksanakan pelatihan praktek dengan peralatan yang digunakan di pabrik untuk sekitar 100 pengajar SMK setiap tahun. Sejak tahun 2019, selain pelatihan di Indonesia, dibuka program pelatihan di Jepang dalam rangka memperluas program pelatihan.

- **Dukungan untuk Pendidikan Tinggi oleh AEM-METI Economic and Industrial Cooperation Committee (AMEICC)**

Telah diberikan dukungan untuk pengembangan kurikulum pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan industri. Sebagai contoh, pemberian dukungan pengembangan kurikulum dalam program sistem otomasi industri di Universitas Darma Persada dengan menyediakan CAD, instrumen, peralatan pendidikan elektro-pneumatik, dll. Kami akan tindaklanjuti sehingga peralatan yang sediakan dapat digunakan secara efisien dan kurikulumnya dapat dikembangkan/disempurnakan. Selain itu, dilakukan berbagai program seperti seminar tentang 5S dan *Kaizen*, program magang di perusahaan untuk Politeknik STTT Bandung dalam rangka membina sumber daya manusia yang siap kerja; memberikan kuliah umum di Universitas Binus, Universitas Achmad Yani, dll.

- **Pelaksanaan Seminar *Monozukuri* untuk Mahasiswa**

Bersama dengan Perhimpunan Persahabatan Indonesia Jepang (PPIJ), perusahaan Jepang anggota JJC mengadakan seminar *monozukuri* untuk mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman di Indonesia tentang semangat *monozukuri* dalam manufaktur Jepang dan menanam budaya *monozukuri* dan dasar manufaktur Jepang di Indonesia, sehingga diharapkan berkontribusi pada perkembangan Indonesia di masa depan, termasuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia dsb. Perusahaan Jepang anggota JJC akan terus memberikan peluang semacam itu sebagai bagian dari upaya kolaborasi industri-akademisi.

[Membangun Kerangka Kerja untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia di dalam Perusahaan]

- **Pelatihan Internal oleh Perusahaan Jepang**

Perusahaan Jepang anggota JJC pada tahun 2018 menciptakan lapangan kerja untuk 7,2 juta orang serta melakukan pengembangan sumber daya manusia untuk masyarakat Indonesia. Sejumlah perusahaan melaksanakan pelatihan untuk calon eksekutif Indonesia di Jepang.

- **Pelatihan di Jepang dan Pengiriman Tenaga Ahli melalui Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnership (AOTS)**

AOTS mendukung pelatihan calon eksekutif lokal dan teknisi yang dilakukan oleh perusahaan Jepang. Dari tahun 1959 hingga tahun 2017 pelatihan telah dilakukan untuk 21.436 orang Indonesia di Jepang dan 19.045 di Indonesia. Melalui dukungan AOTS, kami terus berkontribusi untuk pengembangan sumber daya manusia Indonesia dan promosi alih teknologi ke Indonesia.

- **Implementasi Kegiatan QC Circle secara Berkesinambungan**

Kegiatan *kaizen* (perbaikan) dalam kelompok kecil adalah metode yang sangat efektif untuk mengembangkan pemimpin dan anggota tim dari perspektif peningkatan produktivitas lebih lanjut. Perusahaan Jepang anggota JJC perlu tetap melakukan kegiatan tersebut tidak hanya dengan alasan tersebut tetapi juga untuk mendorong inisiatif dalam melakukan upaya lebih lanjut melalui konferensi QC global, pertemuan tukar pendapat untuk masing-masing perusahaan, berbagi contoh kasus di negara lain dll.

[Inisiatif berdasarkan Sistem Produksi Ramping]

- **Pemberian Dukungan oleh Perusahaan Jepang untuk Perusahaan Indonesia, Pemasok, dan Universitas di Indonesia**

Sebagaimana dijelaskan dalam proposal kebijakan [3] terkait pengembangan sumber daya manusia dan alih teknologi, beberapa perusahaan Jepang anggota JJC melakukan program sistem produksi ramping sebagai pola pengelolaan tempat kerja manufaktur yang efisien secara berkelanjutan di perusahaan lokal, pemasok, dan universitas di Indonesia sebagai berikut:

- i. Pemberian Dukungan untuk Menuju Kemandirian berdasarkan Sistem Produksi Ramping di Jawa Tengah**

Di sebuah perusahaan casting Indonesia di Jawa Tengah, suatu perusahaan memberikan dukungan pada manajemen produksi yang didasarkan pada sistem produksi ramping. Lebih konkretnya, pembimbing dikirim ke perusahaan untuk membantu menerapkan upaya perbaikan dalam kegiatan ringkas dan rapi, kegiatan produksi yang aman dan efisien. Hasilnya, produktivitas meningkat dan perusahaan menaikkan levelnya untuk menjadi pemasok Tier 2 untuk perusahaan otomotif.

- ii. Pembinaan Pemasok melalui Bimbingan Sistem Produksi Ramping di Tempat**

Tidak hanya mempelajari sistem produksi ramping di ruang kelas, tetapi juga bagaimana menggunakan sistem di lokasi produksi secara praktikal dalam mengelola pabrik secara efisien berkontribusi besar pada peningkatan produktivitas. Maka diupayakan peningkatan level pemasok melalui bimbingan praktis sistem produksi ramping oleh instruktur di lokasi produksi perusahaan dan program lintas perusahaan.

- iii. Pemberian Dukungan dalam Pendidikan *Monozukuri***

Di 11 universitas di Indonesia, materi pengajaran sistem produksi ramping disediakan dan instruktur dikirim dalam rangka mendukung pembinaan dosen di universitas. Selain itu, untuk 612 orang di 17 pemasok, diberikan bimbingan terkait pengelolaan lokasi produksi berbasis sistem produksi ramping dalam rangka meningkatkan produktifitas.

[Dukungan untuk Sistem Baru]

- **Dukungan untuk Specified Skilled Worker/Technical Intern Training Program**

Perusahaan Jepang anggota JJC akan memberikan kerjasama yang diperlukan kepada pemerintah Jepang dan Indonesia untuk mengirimkan sumber daya manusia Indonesia ke Jepang dengan lancar dalam kerangka Pekerja Berketrampilan Spesifik (*Specified Skilled Worker*) dengan status izin tinggal baru yang ditetapkan sejak tahun 2019.

3. Pengembangan Infrastruktur

Sebagaimana disinggung pada bab 2-5 sebelumnya, pengembangan infrastruktur aktif dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi untuk periode pertama. Menurut survei McKinsey yang ditugaskan oleh JICA- Bappenas, investasi untuk infrastruktur yang tadinya sekitar 3 persen dari PDB pada 2013-2014 meningkat menjadi 4,5-5 persen pada 2016-2017. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Jepang dan perusahaan Jepang juga telah mendukung upaya tersebut melalui proyek ODA seperti MRT dan beberapa proyek pembangunan pembangkit skala besar di Jawa. Hasilnya, selain dari yang disebutkan di atas, perkembangan nyata telah terlihat dalam peningkatan jaringan jalan tol, telekomunikasi, dll. Selain itu, survei McKinsey tersebut memperkirakan masih ada kebutuhan investasi infrastruktur IDR 7.000 triliun untuk 5 tahun periode kedua pemerintahan. Berdasarkan pengalaman pemerintah Jepang dan perusahaan Jepang yang terlibat dalam pengembangan infrastruktur selama periode pemerintahan pertama, dalam rangka percepatan pengembangan infrastruktur di masa depan dan agar dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kekuatan teknologi di Indonesia, kami merekomendasikan hal berikut ini;



Sumber gambar: website MRT Jakarta

(Proposal Kebijakan terkait Pengembangan Infrastruktur)

• Pemanfaatan teknologi Jepang dan Alih Teknologi ke Indonesia melalui Kerja Sama antara Perusahaan Jepang dan Indonesia

Untuk proyek pembangunan MRT dan pelabuhan Patimban, pinjaman YEN yang diterapkan berupa STEP¹⁶. Dengan pinjaman STEP, meskipun dipersyaratkan pemanfaatan teknologi Jepang dan partisipasi oleh perusahaan Jepang sebagai konsultan/kontraktor, pada kenyataannya melalui usaha patungan oleh perusahaan Jepang dan Indonesia dalam pengerjaan proyek, sehingga teknologi dan pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan Jepang dapat dialihkan ke perusahaan Indonesia melalui kolaborasi tersebut. Selain itu, dalam pelaksanaan pinjaman STEP pun kurang lebih 70% pengadaannya merupakan kandungan lokal. Untuk proyek MRT, pinjaman YEN mencakup operasi dan pemeliharaan *rolling stock* dan sistem sehingga dukungan oleh konsultan sangat penting untuk membangun operasi MRT yang aman dan stabil.

Seperti dijelaskan di atas, pembangunan MRT dan Pelabuhan Patimban dianggap sebagai contoh yang baik sebagai hasil kerjasama Jepang-Indonesia. Ke depan kami berharap pengembangan infrastruktur dengan menyeimbangkan pemanfaatan kandungan lokal secara maksimal dengan pemanfaatan teknologi Jepang dan alih teknologi ke Indonesia.

• Penyusunan Rencana Transportasi Perkotaan berdasarkan Permintaan Penumpang di Masa Depan dan Implementasi Proyek berdasarkan Rencana

Di Jakarta dan kota-kota besar lain di Indonesia masalah transportasi perkotaan seperti kemacetan lalu lintas menjadi masalah yang serius yang sangat mengganggu efisiensi ekonomi dsb. Rencana transportasi perkotaan yang ditujukan untuk mengurangi kemacetan sedang dipertimbangkan di setiap kota. Dalam pemilihan moda transportasi dan penyusunan rencana, aspek biaya rendah, konstruksi dalam waktu yang singkat dan kemudahan akuisisi tanah cenderung diprioritaskan. Namun, sebenarnya yang diperlukan adalah penyusunan rencana transportasi perkotaan berdasarkan permintaan penumpang jangka menengah hingga jangka panjang (termasuk pemilihan moda transportasi).

Untuk wilayah ibukota Jakarta dan sekitarnya, melalui kerjasama teknis JICA “*Jabodetabek Urban Transport Policy Integration Phase 2 (JUTPI2)*”, perkiraan permintaan penumpang di masa depan telah dilakukan. Berdasarkan dengan perkiraan tersebut, rencana transportasi perkotaan dengan jaringan rute untuk masa depan telah diusulkan berdasarkan konsep dasar yaitu MRT untuk rute dengan permintaan besar atas penumpang dan LRT serta moda transportasi lain untuk rute dengan permintaan sedang.

Untuk pengembangan infrastruktur, diperlukan koordinasi antar berbagai K/L dan pemerintah daerah serta pengurusan perizinan, maka untuk memastikan pengembangan infrastruktur sesuai rencana, diperlukan penerapan dan penguatan mekanisme koordinasi di antar K/L dan antara pemerintah pusat dengan daerah.

¹⁶ Pinjaman YEN STEP sebagai skema pinjaman mengikat mulai diterapkan sejak tahun 2002, dalam rangka mendorong pemberian “bantuan yang lebih dapat dilihat” melalui alih teknologi ke negara berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan unggul yang dimiliki Jepang

• Upaya Pemberdayaan Proyek PPP dan Penerapan PMA dalam PPP

Menfasilitasi pengembangan infrastruktur melalui skema PPP dapat mempercepat pembangunan infrastruktur daripada mendorong pembangunan infrastruktur hanya melalui anggaran pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN). Perusahaan PMA, termasuk perusahaan Jepang tetap menaruh minat besar untuk berpartisipasi dalam PPP untuk infrastruktur.

Melalui upaya pemerintah Indonesia selama lima tahun terakhir, seperti pembentukan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PII, penciptaan sistem VGF / AP, dll., skema untuk mendorong PPP untuk infrastruktur sudah mulai dikembangkan. Namun demikian masih ada hambatan terutama bagi perusahaan PMA untuk berpartisipasi dalam PPP untuk infrastruktur seperti banyaknya proses yang harus ditempuh mulai dari proses tender sampai penetapan pemenang yang memakan waktu lama, tidak memadainya kerangka yang mengatur pembagian resiko antara pemerintah dan swasta seperti jaminan pendapatan dll di beberapa sektor, terutama jenis pembiayaan proyek jangka panjang untuk pinjaman dalam mata uang rupiah atau pembiayaan proyek. Pada kenyataannya, skala proyek PPP yang dilaksanakan selama tahun 2010-2017, Indonesia (34 miliar USD) masih memiliki ruang untuk berkembang, dibandingkan dengan Brasil (153 miliar USD), India (136 miliar USD), dan Turki (84 miliar USD)¹⁷. Di masa depan, kami menyambut baik upaya Indonesia terus bersama dengan pemerintah Jepang untuk memberdayakan proyek PPP dan penerapan PMA ke dalam PPP dalam rangka menghilangkan hambatan tersebut.

• Penerapan dan Penguatan Mekanisme Koordinasi antar K/L dan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah

Untuk pengembangan infrastruktur, diperlukan koordinasi antara berbagai K/L dan pemerintah daerah, pengurusan perizinan, akuisisi tanah dll. Karena memakan waktu untuk proses tersebut, dalam banyak kasus terjadi keterlambatan pelaksanaan dari jadwal yang berujung pada penambahan biaya. Untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai rencana, penerapan dan penguatan mekanisme koordinasi antar K/L dan antara pemerintah pusat dengan daerah diperlukan. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan agar setiap prosedur seperti akuisisi tanah, pengurusan perizinan dll, dimana pelaksanaannya berjalan dengan lebih lancar.

(Tindakan JJC)

• Pertukaran Informasi dengan Pemerintah Indonesia untuk Mengidentifikasi Kebutuhan Infrastruktur Masa Depan

Melaksanakan agenda tukar pendapat dengan pemerintah Indonesia untuk berbagi pendapat terkait penghapusan hambatan dalam pembangunan infrastruktur, perlunya pengembangan infrastruktur lebih lanjut di masa depan, harapan pemerintah Indonesia untuk partisipasi perusahaan Jepang dalam pengembangan infrastruktur, dan berbagi informasi terkait upaya-upaya yang dilakukan Indonesia.

¹⁷ Esimasi McKinsey berdasarkan World Bank PPP database.

•Penyebarluasan Informasi untuk Perusahaan Bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia

Pengembangan infrastruktur dilakukan oleh berbagai perusahaan Jepang dan Indonesia dalam kolaborasi untuk konstruksi proyek, manajemen, pengadaan material, dan pekerjaan terkait lainnya. Karena perusahaan pelaksana proyek akan dipilih melalui tender, maka untuk memberikan peluang kepada banyak pelaku usaha, kami akan memfasilitasi penyebarluasan informasi kepada perusahaan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia.

4. Promosi Ekspor/Perluasan Pasar Domestik

Untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan Indonesia dan mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan, diperlukan perbaikan neraca perdagangan menjadi surplus. Pada tahun 2018, perusahaan Jepang berkontribusi 24,4 persen dari ekspor Indonesia. Perusahaan Jepang anggota JJC ingin terus berkontribusi pada promosi ekspor Indonesia. Di sisi lain, untuk memproduksi produk yang bersaing, skala produksi diperlukan sebagai salah satu faktor utama ketika mempertimbangkan biaya. Dengan kata lain, semakin pasar domestik berkembang, maka semakin meningkat potensi ekspor. Dibandingkan dengan negara-negara di sekitarnya, pasar domestik Indonesia cukup besar dan potensi pertumbuhannya di masa depan tinggi, sehingga pasar domestik yang berkembang bisa dijadikan sebagai pendorong ekspor yang kuat. Kami memahami bahwa hal tersebutlah yang akan mendorong mewujudkan daya saing industri Indonesia yang kokoh. Ditambah dengan hal tersebut, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa perusahaan Jepang yang telah memasuki Indonesia memiliki niat kuat untuk memperluas investasi yang sesuai jika iklim bisnis membaik seiring dengan perluasan pasar domestik. Untuk perluasan pasar domestik, diperlukan perluasan skala kegiatan industri, pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung meningkatkan kegiatan industri lebih lanjut dan infrastruktur yang mendukung hal-hal tersebut. Untuk itu, usulan kebijakan kami adalah 1) perbaikan iklim bisnis dan promosi PMA, 2) pengembangan sumber daya manusia dan alih teknologi, dan 3) pengembangan infrastruktur sebagaimana dijelaskan di atas. Bersamaan dengan hal tersebut perlu untuk berupaya meningkatkan lingkungan perdagangan yang bersaing melalui fasilitasi kelancaran impor/ekspor barang modal dan barang produksi, penandatanganan EPA dan FTA strategis dll.

(Proposal Kebijakan Terkait Promosi Ekspor /Perluasan Pasar Domestik)

• Fasilitasi Kelancaran Impor Barang Modal dan Barang Produksi (Perbaikan Masalah Kepabeanan)

Saat ini, banyak barang modal dan barang produksi diimpor dan produk yang diproduksi dengan menggunakan barang-barang tersebut dipasok untuk pasar domestik Indonesia dan sebagian diekspor. Melalui perbaikan iklim bisnis dan promosi PMA, maka penguatan daya saing internasional Indonesia dapat diharapkan melalui pengembangan industri pendukung di masa depan. Namun untuk sementara, perlu memperkuat daya saing internasional melalui kelancaran impor barang modal dan barang produksi yang dibutuhkan. Dalam “*Doing Business 2019 Regional Profile East Asia and The Pacific (EAP)*”¹⁸ Bank Dunia, Indonesia tidak memiliki keunggulan dalam prosedur impor/ekspor dibandingkan dengan negara-negara di sekitarnya, dan

¹⁸ <https://www.doingbusiness.org/en/reports/regional-reports>

keunggulannya rendah terutama dalam prosedur impor. Selain itu, dalam hal impor produk besi baja, setiap enam bulan atau setahun sekali, persetujuan impor harus diperoleh dari Kementerian Perdagangan RI setelah mendapat surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian RI. Ditambah dengan hal tersebut, sering kali proses perolehan persetujuan impor memakan waktu lebih lama daripada yang diharapkan karena sering terjadi perubahan peraturan yang menetapkan pelaksanaan, atau peraturan tidak berubah tetapi adanya penafsiran pejabat yang berwenang sehingga aturan tiba-tiba menjadi lebih ketat. Akibatnya, biaya produksi meningkat karena timbulnya kebutuhan pengiriman darurat untuk kebutuhan produk besi baja dll, yang mengakibatkan penurunan daya saing internasional. Di masa lalu produksi mobil di Indonesia hampir terhenti akibat ketidاكلancaran impor produk besi baja karena keterlambatan persetujuan impor. Bahkan sampai hari ini, risiko semacam itu masih tetap ada. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa jika produksi mobil terhenti, akan memiliki dampak besar pada pasar domestik dan ekspor, yang menyebabkan kerugian ekonomi yang serius.

Time to import: Documentary compliance		Cost to import: Documentary compliance	
Country	(hours)	Country	(USD)
Thailand	4.0 hours	Thailand	43.0 USD
Malaysia	7.0 hours	Philippines	50.0 USD
Vietnam	76.0 hours	Malaysia	60.0 USD
Philippines	96.0 hours	Indonesia	164.4 USD
Indonesia	106.2 hours	Vietnam	183.0 USD

Sumber: Doing Business 2019 Regional Profile East Asia and the Pacific (EAP)

• **Pengembangan Lingkungan Perdagangan yang Bersaing melalui EPA, FTA, dll.**

Indonesia telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan perjanjian kemitraan ekonomi (EPA) dengan sejumlah negara, seperti Perjanjian Kemitraan Ekonomi Jepang-Indonesia (JIEPA). Penting untuk memperluas dan memanfaatkan kerangka kerja semacam itu semaksimal mungkin untuk memperlancar perdagangan. Terutama penting memilih mitra secara strategis untuk dinegosiasikan dengan FTA atau EPA sesuai karakteristik dan kekuatan produk yang dihasilkan Indonesia. Selain itu, perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sangat diharapkan penandatanganannya di waktu awal dalam rangka memperbaiki lingkungan perdagangan untuk Indonesia.

• **Deregulasi Kawasan Berikat(KB) untuk Ekspor**

Perusahaan pemasok yang telah memasuki Indonesia dengan tujuan untuk memasok suku cadang ke produsen perakitan yang berorientasi ekspor tidak dapat melakukan pasokan suku cadang sebagai produk ekspor secara sepenuhnya karena hengkangnya produsen perakitan yang menerima produknya. Agar perusahaan pemasok semacam itu dapat bertahan dalam bisnis di Indonesia, mereka harus bertransaksi dengan produsen perakitan yang berorientasi untuk memenuhi permintaan domestik. Dalam hal ini, apabila permintaan domestik (yang kena pajak) meningkat, mereka tidak dapat mempertahankan status kawasan berikat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 131 tahun 2018 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai No. 19 tahun 2018, semakin meningkat jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan untuk meminta kuota

penjualan domestik di atas 50 persen terhadap realisasi ekspor tahun sebelumnya. Perusahaan semacam itu tidak memiliki kemampuan untuk memiliki 2 pabrik dimana satu pabrik yang berikat dan satu pabrik yang tidak. Jika perusahaan pemasok tersebut tidak mendapatkan kuota penjualan atau harus memprioritaskan transaksi dengan produsen perakitan berorientasi permintaan domestik, mereka harus melakukan perubahan status. Hal tersebut juga menyebabkan peningkatan biaya bagi produsen perakitan yang memiliki status kawasan berikat sehingga kehilangan manfaat dari status kawasan berikat yang pada gilirannya menyebabkan hilangnya daya saing ekspor. Penting untuk dipertimbangkan deregulasi kawasan berikat untuk ekspor, serta menyelamatkan perusahaan-perusahaan tersebut sehingga dapat mempertahankan pondasi untuk promosi ekspor.

(Tindakan JJC)

• Upaya Promosi Ekspor/Perluasan Pasar Domestik Lebih Lanjut

Perusahaan Jepang anggota JJC akan terus berusaha untuk menciptakan produk dan jasa yang bersaing yang berkontribusi pada promosi ekspor dan perluasan pasar domestik dengan biaya dan mutu yang lebih bersaing melalui peningkatan produktivitas, tingkat kandungan lokal yang lebih tinggi, dll., Selain itu, perusahaan Jepang anggota JJC akan berupaya untuk meningkatkan investasi sesuai perbaikan iklim bisnis dan perluasan pasar domestik yang akan berkembang.

5. Lain-Lain

Dalam rangka mewujudkan penguatan daya saing internasional Indonesia dan pembangunan berkelanjutan, upaya mendorong inovasi juga sangat penting.

Dari enam perusahaan *unicorn* di ASEAN, empat berkembang di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada di masyarakat seperti penetrasi kepemilikan rekening bank yang masih kurang, kemacetan lalu lintas dll, layanan pembayaran dan penyelesaian untuk kalangan konsumen yang sangat besar, berbagai jenis jasa pengiriman dan layanan gaya hidup dsb berkembang pesat. Perusahaan Jepang memperhatikan kegiatan-kegiatan startup Indonesia dan terus bergerak untuk berkolaborasi. Dalam perjalanan pemerintah Indonesia mengembangkan Making Indonesia 4.0, mendukung untuk startup akan sangat penting. Perusahaan besar Jepang dan startup ingin berkontribusi pada mitra Indonesia dengan teknologi inovatif dan rencana bisnis. Untuk itu, perbaikan iklim (deregulasi syarat modal minimum, dll.) dan pemberian dukungan aktif (insentif pajak, dll.) sangat diharapkan sehingga mereka dapat dengan lancar melakukan kegiatannya.

Untuk mendorong inovasi, ada kecenderungan untuk berfokus menggali dan membina perusahaan ventura, tetapi melindungi kekayaan intelektual juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. Sebagaimana diketahui, undang-undang tentang paten pada umumnya dapat melindungi inventor tetapi secara bersamaan mendorong penyebaran pengetahuan dan menyingkirkan investasi yang tumpang tindih melalui pengumuman patennya. Mengembangkan iklim yang kondusif untuk perlindungan kekayaan intelektual yang tepat memiliki aspek yang sangat penting untuk mendorong inovasi. Selain itu, saat ini inovasi sering difasilitasi melalui teknologi digital. Adanya pemanfaatan teknologi digital yang semakin maju, mendukung penyebaran berbagai data dan dapat digunakan untuk mendorong inovasi serta pembangunan berkelanjutan yang lebih baik. Tetapi di sisi lain memerlukan tindakan yang tepat untuk melindungi data dan informasi pribadi. Deklarasi KTT Osaka G20 pada bulan Juni 2019 mengemukakan

pentingnya *Data Free Flow With Trust*. Dengan demikian, diharapkan adanya upaya perbaikan iklim yang kondusif untuk mendorong inovasi.

[Kesimpulan]

Pemerintah Jepang dan Indonesia akan membentuk kelompok kerja pemerintah-swasta Jepang-Indonesia dan melakukan diskusi mengenai promosi ekspor dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam rangka mengimplementasikan dan merealisasikan proposal kebijakan ini, JJC harus secara aktif berpartisipasi dalam kelompok kerja publik-swasta dan memberikan masukan dengan perspektif perusahaan Jepang.

Agar dapat memberikan kontribusi secara maksimum demi kemakmuran perusahaan Jepang dan Indonesia, JJC akan mengambil berbagai peluang untuk melakukan komunikasi yang berkelanjutan dengan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi Indonesia dan dapat mencapai tujuannya pada tahun 2045 dengan berupaya untuk memperkuat daya saing internasional Indonesia dan mendukung pembangunan berkelanjutan.